KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. BANJARNEGARA

Oleh: Ika Frilia Herafati, Gagoek Hardiman, Titien Woro Murtini

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah Kab.Banjarnegara akan mulai menata beberapa kawasan menjadi suatu kawasan perkantoran supaya dinamika pembangunan fisik kawasan kota Banjarnegara dapat berkembang secara terencana. Dalam rangka mengkonsepkan kantor pelayanan publik yang terpadu, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan perancangan perkantoran yang strategis dan ideal untuk kebutuhan publik itu sendiri, maka di sediakan lahan milik pemerintah daerah yang berada dalam lingkungan pengembangan untuk perkantoran pemerintah Banjarnegara. Salah satu kantor yang akan di bangun yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kajian diawali dengan mempelajari pengertian tentang kantor, pengertian dan standarstandar mengenai kantor dinas pemertintahan, , serta studi banding beberapa kantor dinas yang telah ada. Pendekatan perancangan arsitektural dilakukan dengan konsep kontekstual dengan lingkungan di indonesia yaitu tropis.. Selain itu dilakukan pendekatan fungsional, kinerja, teknis, dan konstekstual.

Sebagai kesimpulan, luaran program ruang yang diperlukan, serta gambar-gambar 2 dimensi dan 3 dimensi sebagai ilustrasi desain.

Kata Kunci : Kantor Pelayanan, Dinas Pemerintahan, Banjarnegara, Tropis

1. Latar Belakang

Dalam perkembangannya, pemerintah daerah Kab.Banjarnegara sudah mulai menata beberapa kawasan menjadi suatu kawasan perkantoran, perdagangan maupun perkonomian di beberapa titik. Hal ini di lakukan supaya dinamika pembangunan fisik kawasan kota Banjarnegara dapat berkembang secara terencana. Khususnya dengan mengkonsepkan kantor pelayanan publik yang terpadu, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan perancangan perkantoran yang strategis dan ideal untuk kebutuhan publik itu sendiri.

Kawasan Desa Semampir, yang berada di Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara dengan luas+ 20 Ha merupakan lahan milik pemerintah daerah yang berada dalam lingkungan pengembangan untuk perkantoran pemerintah Banjarnegara. Beberapa gedung instansi pun akan didirikan di kawasan ini, salah satunya yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau lembaga

teknis berbentuk Dinas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara. Daerah Dimana merupakan kantor pelayanan publik yang berkegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi diselenggarakan yang penyelenggara pelayanan publik.

Guna mendukung perkembangan wilayah di Kabupaten Banjarnegara, maka dari itu pemerintah melakukan perencanaan pembangunan gedung baru di mana gedung awal yang berada di Jl. Jenderal A. Yani No. 07, Banjarnegara di pindahkan ke Kawasan Desa Semampir, beberapa gedung perkantoran lainnya pun akan dipindahkan di kawasan ini. Sehingga peruntukan lahan sebagai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirasa tepat. sudah Bangunan kantor yang baru ini pun di harapkan dapat menggunakan energi

secara efisien sesuai dengan iklim di mana tapak bangunan tersebut berada.

2. Rumusan Masalah

- a. Perlu tempat yang mewadahi para pegawai kantor yang representatif
- b. Diperlukan fasilitas yang nyaman di lingkungan kantor
- c. Diperlukan beberapa fasilitas tambahan yang menunjang kegiatan kantor

3. Metodologi

a. Metode Deskriptif

Yakni dengan melakukan pengumpulan data primer maupun sekunder. Data –data yang dimaksud adalah dasar tinjauan fisik dan non fisik serta literatur yang berkenaan dengan studi perencanaan dan perancangan ini.

b. Metode Dokumentatif

- Dbservasi lapangan, dilakukan sebagai pengamatan langsung terhadap objek perencanaan.
- Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak terkait, guna melengkapi data-data yang diperoleh dari observasi lapangan.
- Studi pustaka, dilakukan untuk memperoleh data-data literatur

4. Kajian Pustaka

4.1. Tinjauan Kantor

Dalam Kamus Pintar Bahasa Indonesia, kantor adalah bangunan yang dipakai bekerja yang berkenaan dengan urusan administrasi. Sedangkan dikutip dari www.wikipedia.org Kantor (dari bahasa Belanda kantoor) adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Kantor

sering dibagi kepada dua jenis; terbesar dan kantor yang terpenting biasanya dijadikan kantor pusat, sedangkan kantorkantor lainnya dinamakan kantor cabang. Dinas menurut Kamus Pintar Bahasa Indonesiaadalah jawatan / segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pekerjaan kantor (pegawai negeri).

4.2. Jenis Bangunan Kantor

Pembagian jenis bangunan perkantoran bedasarkan Planning Office,1976 dikelompokan menjadi 2 jenis, yakni :

- a. Bedasarkan organisasi perusahaan, bangunan kantor dapat dibedakan menjadi bangunan kantor pemerintah dan bangunan kantor swasta.
- b. Berdasarkan Kepemilikan kantor dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : Bangunan kantor kepemilikan, Kantor Sewa/ Rental Office, dan Kantor milike negara atau bangunan instansi pemerintahan.

4.3. Standarisasi Ruang Kantor Dinas Instansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Pemerintah Prasarana Kerja Daerah, Ruangan Kantor dimana yang telah dimaksut diatas meliputi : Ruang Kerja, Ruang Tamu, Ruang Staf/Adc, Ruang Tunggu, Ruang Rapat, Ruang Data, Ruang Bendahara/Pemegang Kas, Ruang Sandi Dan Telkom, Ruang Arsip Rahasia, Ruang Arsip, Ruang Baca Perpustakaan, dll

STANDAR LUAS RUANG GEDUNG KANTOR

A. RUANG KERJA

	LUAS RUANG(==)										
JA-BATAN	RG. RERIA	RG. TRANU	RG. BAPKT	NG RAPAT UTAMAA	AG. SEKRET	NG. TUNISGU	RG. SMPAN	RG. ISTRAHAR	RG. TOLET	JUMLAH	HET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Menteri	28.00	40.00	40.00	140.00	58.00	60.00	34.00	20.00	6.00	406.00	Stander lue
Eselon IA	36.00	14.00	20.00	90.00	30.00	18.00	5.00	10.00	4.00	1/97.00	ruang tersebu
Eselon IB	36.00	14.00	30.00	0.00	10.00	9.00	5.00	5.00	3.00	82.00	merupakan
Eselon IA	14.00	12.00	14.00	0.00	10.00	12.00	3.00	5.00	3.00	75.00	aturan dasa
Eselon IIB	34.00	12.00	10.00	0.00	5.00	6.00	3.00	0.00	3.00	58.00	yang adapa
Eselon IIA	12.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	34.00	menurut.
Eselon IIIB	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	25.00	fungsi/sites
Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	tiap
Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	exelon/jabata
Staff	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	

B. BUANG PENUNIANG

1. Ruang Rapat = 40 m⁻¹

Ruang Studio = 4 m²/ orang (pemakai= 10% dari staf)
Ruang Arsio = 0.4 m²/ orang (pemakai=staf)

4. WC = 2m²/25 orang

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 te Ntang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara

4.4. Tinajuan Penekanan Arsitektur Tropis

Arsitektur adalah perpaduan seni, ilmu, dan teknologi yang berkaitan dengan bangunan dan penciptaan ruang untuk kepentingan manusia (Budiharjo, 1997). Sedangkan kata tropis berasal dari bahasa Yunani, yaitu "tropikos" yang berarti garis balik yang meliputi sekitar 40% dari luas seluruh permukaan bumi. Garisgaris balik ini adalh garis lintang 23°27° utara dan selatan (Lippsmeier, 1994).

Berikut beberapa uraian faktor iklim yang memperngaruhi disain arsitektur menurut (Lippsmeier, 1994).

- a. Radiasi Sinar Matahari
- b. Curah Hujan dan Kelembaban
- c. Temperatur
- d. Gerakan Angin dan Udara

5. Studi Banding

a. Kantor Disduk Capil Kab. Semarang







Gambar 1. Kondisi Eksisting Indoor & Outdoor

Sumber : Dokumentasi Penyusun, Maret 2014

b. Kantor Disduk Capil Kota Semarang



Gambar 2. Kondisi Eksisting Indoor & Outdoor

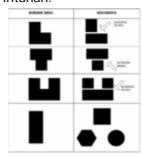
Sumber : Dokumentasi Penyusun, Maret 2014

6. Pendekatan Arsitektural

Dalam pendekatan arsitektural, ada beberapa hal mengenai aspek tampilan bangunan. Menurut F.D.K Ching dalam bukunya *Arsitektur : Bentuk, Ruang, dan Tatanan*, pendekatan terhadap bentuk bangunan mengacu pada ciri visual sebagai berikut :

a. Wujud

Berikut bentuk yang sesuai dengan bangunan perkantoran pemerintahan.



Gambar 3. Bentuk denah bangunan gedung. *Sumber*: PerMen PU no. 29/PRT/M/2006

b. Proporsi

Merupakan skala/ dimensi bentuk bangunan yang proporsional. Dengan membentuk suatu gubahan massa dimana dimensinya dbuat dengan selaras supaya menciptakan proporsi bentuk yang menarik dan bangunan dapat dilihat keseluruhan oleh tinggi mata manusia.

c. Warna

Pemilihan warna pada pada bangunan dipilih beberapa warna yang menarik yang nantinya akan menunjang bentuk dari bangunan tersebut.

WARNA	JARAK	EFFECT		
WARRA	JANAK	SUHU	PSIKIS	
BURU	JAUH	SEJUK	MENYEJUKKAN	
HUAU	JAUH	TERSEJUK NETRAL	MENYEJUKKAN	
MERAH	DEKAT	PANAS HANGAT	MENYOLOK	
ORANGE	DEKAT	TERHANGAT		
KUNING SAWO MATANG	DEKAT	TERHANGAT NETRAL	MERANGSANO MERANGSANO	
UNGU HITAM/	TERDEKAT	SEJUK PANÀS	MERANGSANO	
MERAH TUA KEEMASAN	CERAH	MSERAL.	ARISTOKRAT	

Gambar 4. Efek Psikologis dari warna pada ruang.

Sumber : Disain Interior, 1999. Halaman 70

e. Tekstur

Merupakan karakter permukaan bangunan. Tekstur bangunan akan terlihat ketika bangunan akan dirancang dengan tampilan solid dan void serta aplikasi elemen kaca yang juga merupakan variasi dari tekstur bangunan. didesain dengan tekstur tampak solid dan void yang selaras antar bangunan.

f. Posisi

Merupakan letak relative suatu bangunan terhadap lingkungan sekitar. Perletakan massa bangunan akan akan disesuaikan dengan bentuk tapak serta lingkungan sekitar.

g. Orientasi

Merupakan posisi relative suatu bangunan terhadap bidang dasar. Arah hadap bangunan akan disesuaikan dengan analisa arah angin, matahari, dan pandangan pengunjung terhadap bangunan.

7. Kesimpulan Perancangan

7.1. Program Ruang

	Kelompok Fasilitas Utama			
No	Ruang	Luas (m²)		
1.	Ruang Pelayanan (Front Office)			
	Loket	10,54		
	Ruang Tunggu Pelayanan	48		
	Ruang Operator	15,57		
	Ruang Foto			
	Ruang Percetakan KTP	9		
	Ruang Draft	8,52		
	Ruang Pengambilan + Kasir	9,62		
	Aumlah - Sirkulosi 30%	1141,2		
2.	Ruang Pengelola (Back Office)			
a.	Ruang Kepala Dinas	891		
b.	Sekertoriet Dines			
	Ruang Kepala Sekertariat	8 52,5		
	Subbag Perencansan dan Bralussi	190,12		
	Subbag Umum dan Kepegawatan	±80,12		
	Subbag Keuangan	±71,64		
	Total Ruang Sekretoriat Dinas	±269,42		
ε.	Bidang Data dan Dakumen Kependudukan			
	Ruang Kepala Bidang	151,2		
	Seksi Pengelolaan Data dan Informasi	±80,12		

	Seksi Perubahan Data dan Dokumen	880,12
	Kependudukan	
	Seksi Pemeliharan dan Penyimpanan	±71.64
	Ruang Fotocopy	15.04
	Jumlah	8.269,42
d.	Bidang Pendaftaran Penduduk	
	Ruang Kepala Bidang	#51,2
	Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk	±80,12
	Seksi Pendaftaran Penduduk Sementara	8 90,12
	Seksi Perpindahan Penduduk	8.71,64
	Ruang Fotocopy	15,04
	Jumlah	1269,42
4.	Bidang-Pensatatan Sipil	
	Ruang Kepala Bidang	831,2
	Seksi Kelahiran	8 92,66
	Seksi Perkawinan dan Perceralan	155.5
	Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengangkatan	188,6
_	Anak	
_	Ruang Fotocopy	85,04
	Jumlah	1106,1
f.	Bidang Pengendalan Penduduk	
	Ruang Kepala Bidang	#31.2
	Seksi Pengavasan dan Pengendalian	171,64
	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	871,64
	Seksi Mobilitas Penduduk	±77,88
	Ruang Fotocopy	15,04
	Jumlah	1257,4
	Jumlah + Sirkulasi 30%	11936,688

Gambar 5. Kelompok Fasilitas Utama

Sumber: Analisa

Kelompok Fasilitas Penunjang			
No	Ruang	Luas (m²)	
1.	Unit Kesehatan	±18	
2.	Koperasi	±71,64	
3.	Ruang Administrasi Koperasi	±86	
4.	Kantin (Cafetaria)	± 115,85	
5.	Ruang Penerima (Hall)	±124,54	
	Total Luas Ruang Penunjang + Sirkulasi 30%	± 540,839	

Gambar 6 . Kelompok Fasilitas

Penunjang

Sumber : Analisa

	Kelompok Fasilitas Service + Parkir Indo	or
No	Ruang	Luas (m²)
1.	Lavatory	
	Lavatory Pengunjung	±17,4
	Lavatory Pegawai Sturktural	±58,26
	Lavatori Pegawai Non Struktural	±58,26
2.	Musholla Pegawai	±52,56
	Musholla Pengunjung	±52,56
3.	Ruang Office Girl/Boy	± 31,8
4.	Ruang Pelayanan dan Penyimpanan	±140,25
5.	Ruang MEE	±354,12
6.	Ruang Green House (Perawatan Tanaman)	24,41
7.	Parkir Pengunjung	335
	Parkir Pegawai	470
8.	Service Sirkulasi Vertikal @5lantai	± 707,82
	Total Luas Fasilitas Servis Dan Parkir	± 3108,22

Gambar 7 . Kelompok Fasilitas Service +

Parkir Indoor

Sumber : Analisa

No	Ruang	Luas (m²)
1.	Lapangan Upacara dan Olahraga	± 657
2.	Pos Keamanan	±8
3.	Parkir Outdoor (Garasi Pejabat)	±78
4.	Total Luas Ruang Parkir Outdoor + Sirkulasi 100%	156
	Total Luas Fasilitas Outdoor	± 821

Gambar 8 . Kelompok Fasilitas Outdoor

Sumber: Analisa

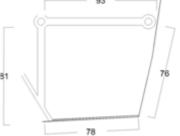
Luas Total Fasilitas				
No	Fasilitas	Luas (m²)		
1.	Fasilitas Utama	±2077,88		
2.	Fasilitas Pendukung	± 1249,6		
3.	Fasilitas Penunjang	± 540,831		
4.	Fasilitas Servis Dan Parkir Indoor	± 3108,22		
5.	Fasilitas Outdoor	± 82		
	Luas Keseluruhan	±7787,5		

Gambar 9 . Luas Total Fasilitas

Sumber: Analisa

7.2. Tapak Terpilih





Gambar 10. Lokasi tapak Dindukcapil

Kab. Banajarnegara

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara



Gambar 11.Foto Eksisting Tapak

Sumber: Dokumentasi Penyusun, Maret

2014

Utara : Lahan Pengembangan

Pertanian

Selatan : Jalan Raya Semampir Timur : Permukiman Penduduk Barat : Permukiman Penduduk dan

Lahan Pertanian

KDB = 50%

KLB = $1.6 - 2.0 \,\text{max}$.

Max. Lantai = 5 lantai.

- A. Dengan KDB 50% maka:
 - 1. Luas tapak yang diperkenankan tertutup perkerasan adalah
 - = (KDB x Luas Tapak)
 - =0.5x 6669 m2
 - = ± 3334,5 m2

Maka luas dasar bangunan maksimal adalah =

Luas tapak yang diperkenankan tertutup perkerasan - luas fasilitas outdo

yang tertutup perkerasan (a) = 3334,5 m² - 821 m²

= 3334,5 - 821

= ± 2513,5 m²

Sirkulasi berupa jalan dan pedestrian di dalam tapak (b) = 30%x2513.5 = 754 m²

Maka, Luas dasar bangunan maksimal = a - b = 2513,5 m² - 754 m²

= ± 1759,5 m²

1 2. Jumlah lantai bangunan yang diperkirakan adalah

- = Luas lantai bangunan : Luas maksimal dasar bangunan
- = 6976,5 m²: 1759,5m²
- = 3,9 ≈ 4 lantai → peraturan ketinggian maksimal 5 lantai (sehingga mas memenuhi persyaratan)
- 3. Lantai bangunan digunakan 4 lantai, sehingga :

Luas masing-masing lantai = Luas lantai bangunan : Jumlah Lantai yang d gunakan

= 6976,5 m²: 4lt

= ± 1729.12 m²/lt

B. Dengan KLB koefisien 1,6 max. 5 Lantai, maka :

KLB bangunan

- = Luas lantai bangunan : Luas tapak
- = 6976,5 m²: 6669 m²
- = 1,0 → KLB maksimal yang ditetapkan sebesar 1,6 (sehingga luas lantai bangunan tersebut masih sesuai dengan peraturan daerah setempat)

8. DAFTAR PUSTAKA

Adler. David.1999. Metric Handbook Planning and Design Data Second Edition. The Architectural Press Ltd: Great Britain.

Budiharjo, Eko. 1997. Arsitektur sebagai Warisan Budaya. Djambatan, Jakarta

- De Chiara, Joseph dan John Hancock Callender. 1973. Time-Saver Buildina Standards for Types. McGraw-Hill Book Company: New York
- Duffy, Francis. 1976. Planning Office Space. Architectural Press: London
- Frick, Heinz. 2007. Ilmu Konstruksi Utilitas Perlengkapan dan Penerbit Bangunan. Edisi ke-2. Kanisius, Yogyakarta

Lippsmeier, Georg. 1994. Bangunan Tropis, Terjemahan. Penerbit Erlangga, Jakarta

Manasseh, Leonard and Cunliffe, Roger. 1962. Office Buildings. Reinhold Publishing Corporation: New York. Neufert, Ernst. 1991. Data Arsitek

Jilid 1, Terjemahan. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Neufert, Ernst. 2002. Data Arsitek Jilid 2, Terjemahan. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Neufert, Ernst. Architect's Data Third Edition. Blackwell Science Ltd: Great Britain.

Palmer, Alvin E. 1977. Planning the office landscape. McGraw-Hill, Inc: USA

Panero, Julius dan Martin Zelnik.1979. Human Dimension and Interior Space. The Architectural Press Ltd: Great Britain.

Pickard, Quentin. 2002. The Architect's Handbook. Blackwell Science Ltd: Great Britain.

Yasyin, Sulchan. 1995. Kamus Besar Indonesia.Penerbit Bahasa Amanah, Surabaya.

Chueller, Wolfgang, 2001, Struktur Bangunan Bertingkat Tinggi, PT Refika Aditama, Bandung

Suptandar, J. Pamuji. 1999. Disain Interior: Pengantar Merencana Interior Untuk Mahasiswa Disain dan Arsitektur. Djambatan: Jakarta

Sumber lain-lain:

- http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id/pr ofil, diakses Rabu, 05 Februari 2014, Pukul 12:28PM
- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembanguan Gedung atau Kantor Pemerintahan.

9. Ilustrasi Perancangan



